

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Menurut Soejono D.⁷ Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai sebab akibat, perubahan, dan penangkalan kejahatan. Sedangkan menurut Andi Zainal Abidin,⁸ kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan mengenai faktor dan penyebab terjadinya kejahatan serta penanggulangannya.

Secara umum Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mendalami suatu hal tentang kejahatan (*crimes*). Namun, kejahatan jika disamakan dengan pandangan hukum pidana (yuridis) terhadap pandangan kriminologi sangat berbeda (luas).

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan. yang tidak sesuai dengan nilai – nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Di dalam lingkup hukum pidana, kriminologi harus memiliki peran antisipatif dan reaktif yang dapat mencegah timbulnya akibat dari berbagai kerugian baik untuk si pelaku, korban, maupun masyarakat. Peran antisipasi yaitu upaya yang dilakukan pada saat peristiwa

⁷ R. Soesilo. Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), Hal. 3.

⁸ Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., Dian Andrisari, S.H., M.H, *Op.cit.* Hal. 18

atau masalah terjadi dengan cara merencanakan dan bertindak. Sedangkan peran reaktif yaitu responsif terhadap peristiwa atau masalah yang sudah terjadi.

Ruang lingkup yang dibahas dalam kriminologi memiliki beberapa pokok, yakni :

- a. Suatu cara pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Definisi kejahatan, unsur – unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, statistik kejahatan dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana.
- b. Etiologi kriminal, membahas teori penyebab kejahatan (*breaking of laws*). Aliran – aliran (mazhab) kriminologi, teori – teori kriminologi, dan perspektif kriminologi dibahas dalam Etiologi Kriminal.
- c. Reaksi dalam pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi ini ditujukan terhadap calon pelanggar hukum seperti upaya pencegahan kejahatan, bukan hanya kepada pelanggar hukum. Pelanggaran hukum dalam hal ini membahas mengenai teori – teori penghukuman, dan upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun rehabilitatif.⁹

⁹ Prof. Dr. A.S. Alam, S.H., M.H, Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 3

Tawuran antar perguruan pencak silat dapat dianalisis melalui berbagai teori kriminologi, yang masing-masing memberikan penjelasan berbeda tentang mengapa konflik semacam ini terjadi, antara lain :

- a. **Teori Ketegangan (*Strain Theory*)**, yang dikemukakan oleh Robert Merton, menyatakan bahwa ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan sosial melalui cara yang sah dapat menimbulkan ketegangan yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam konteks tawuran antar perguruan pencak silat, ketegangan ini bisa berasal dari persaingan prestasi, harga diri yang terluka, atau ketidakmampuan untuk mengakui kekalahan dalam kompetisi.
- b. **Teori Interaksi Sosial (*Social Process Theories*)**, khususnya **Teori Pembelajaran Diferensial (*Differential Association Theory*)** oleh Edwin Sutherland, menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Dalam kasus tawuran, anggota perguruan bisa terpengaruh oleh rekan-rekan mereka yang lebih senior atau teman sebaya yang mendukung perilaku kekerasan sebagai cara mempertahankan kehormatan perguruan. **Teori Labeling (*Labeling Theory*)** juga relevan, di mana anggota yang terlibat dalam tawuran mungkin mulai menerima label negatif sebagai "preman" atau "tukang tawuran," yang kemudian memperkuat identitas kriminal mereka dan mendorong tindakan yang lebih agresif di masa depan.

c. **Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)** dari Travis Hirschi juga bisa menjelaskan mengapa tawuran terjadi. Ketika ikatan individu dengan institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat melemah, kontrol sosial atas perilaku mereka menurun, yang meningkatkan kemungkinan keterlibatan dalam tindakan kriminal seperti tawuran. Dalam hal ini, kurangnya disiplin dan pengawasan dari lembaga-lembaga tersebut bisa menjadi faktor yang mendorong terjadinya kekerasan antar perguruan.

d. **Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*)**, yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ada pelaku yang termotivasi, target yang cocok, dan tidak adanya pengawasan yang efektif, juga dapat menjelaskan tawuran. Ketika sekelompok anggota perguruan bertemu tanpa adanya pengawasan dari pihak berwenang atau senior yang bisa menenangkan situasi, dan ada motivasi untuk membalas penghinaan atau mempertahankan kehormatan, kesempatan untuk tawuran meningkat

e. Akhirnya, **Teori Konflik (*Conflict Theory*)** memandang bahwa tawuran antar perguruan pencak silat dapat dipahami sebagai manifestasi dari ketidakadilan sosial dan persaingan kekuasaan.

Perguruan yang merasa ditekan atau terpinggirkan mungkin melihat tawuran sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan identitas dan eksistensi mereka dalam komunitas pencak silat yang lebih luas. Secara keseluruhan, berbagai teori kriminologi ini memberikan

pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya tawuran, mulai dari tekanan sosial, pengaruh kelompok, hingga kurangnya kontrol sosial.

B. Tinjauan Umum Konflik

1. Pengertian Konflik

Konflik adalah perbedaan atau pertentangan yang terjadi antara individu atau kelompok sosial karena perbedaan kepentingan dan upaya untuk mencapai tujuan dengan cara yang ditentang oleh pihak lawan, disertai dengan ancaman atau kekerasan.¹⁰ Menurut beberapa ahli, konflik dapat di definisikan sebagai berikut:

- a. Soerjono Soekanto: Konflik itu sendiri suatu proses dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan disertai ancaman dan kekerasan.¹¹
- b. Lewis A. Coser: Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya terbatas. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh sumber-sumber yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Hal. 91.

¹¹ Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Fajar Interpratama Offset. Jakarta. Hal. 52

¹² *Ibid*

- c. Leopold von Wiese: Konflik adalah suatu proses dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.
- d. Duane Ruth-Hefelbower: Konflik adalah kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber, dan/atau tindakan salah satu pihak menghalangi, mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil.¹³

Dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik di dalam diri individu maupun antar kelompok.

Konflik adalah salah satu bentuk interaksi antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas.

¹³ Sarlito W. Sarwono dkk. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. Hal. 171.

2. Bentuk-Bentuk Konflik

Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat disebutkan dalam beberapa bentuk konflik :¹⁴

a. Berdasarkan Sifatnya

- 1) Konflik Destruktif: Konflik yang dipicu oleh perasaan negatif seperti benci dan dendam, berujung pada kekerasan fisik dan kerugian material.
- 2) Konflik Konstruktif: Konflik yang muncul dari perbedaan pendapat, menghasilkan konsensus dan perbaikan.¹⁵

b. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

1) Konflik Vertikal

Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.

2) Konflik Horizontal

Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.

3) Konflik Diagonal

Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga

¹⁴ Agusman M. Ali. 2014. *Pengantar Konflik Sosial*. Jakarta: Pustaka Iltizam

¹⁵ Soejono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

menimbulkan pertentangan yang ekstrem. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh.

c. Berdasarkan Sifat Pelaku yang Berkonflik

1) Konflik Terbuka

Merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak. Contohnya konflik Palestina dengan Israel.

2) Konflik Tertutup

Merupakan konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik.

d. Berdasarkan Konsentrasi Aktivitas Manusia di Dalam Masyarakat

Konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan budaya, misalnya perbedaan pendapat tentang RUU anti-pornografi dan porno-aksi.¹⁶

e. Berdasarkan Ciri Pengelolaannya

1) Konflik antarindividu

Konflik yang terjadi antara seseorang dengan satu atau lebih orang lainnya, baik substantif maupun emosional.

2) Konflik Antarkelompok

Konflik yang terjadi antar kelompok dalam masyarakat, misalnya konflik antar kampung. Lewis A. Coser membedakan konflik atas bentuk dan tempat terjadinya konflik.¹⁷

¹⁶ Nasikun 1993. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta.

¹⁷ Lewis A, koser dan Douglas J, Gootman. 2014. *Teori Sosiologi modren*. Jakarta. Prenada media. Hal 154.

f. Berdasarkan Bentuk

Berdasarkan bentuknya, kita mengenal konflik realistik dan konflik nonrealistik.

- 1) Konflik realistik adalah konflik yang muncul dari ketidakpuasan dalam hubungan sosial, misalnya mogok kerja.
- 2) Konflik non-realistik adalah konflik yang muncul dari kebutuhan meredakan ketegangan, misalnya penggunaan jasa ilmu gaib.

g. Konflik Berdasarkan Tempat Terjadinya

Berdasarkan tempat terjadinya, kita mengenal konflik in-group dan konflik out-group.

- 1) Konflik in-group adalah konflik yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat sendiri, misalnya pertentangan internal dalam masyarakat.¹⁸
- 2) Konflik out-group adalah konflik yang terjadi antara kelompok atau masyarakat berbeda, misalnya konflik antara dua desa.

Tawuran antar perguruan pencak silat dapat dianalisis melalui Teori Konflik Simon Fisher dan Deka Ibrahim antara lain yaitu Teori Kebutuhan dan Teori Identitas.¹⁹ Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa “*Konflik berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental dan social yang tidak terpenuhi atau yang dihalangi*”. Menurut teori ini bahwa konflik

¹⁸ Wahi Din. 2005. *Penyebab konflik*. Jakarta.

¹⁹ Sukardi, *Penangan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Retoratif*, (Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 1, 2016).

terjadi disebabkan oleh benturan kepentingan antar manusia dalam memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar baik fisik maupun mental dan social yang dalam kondisi tidak terpenuhi. Sedangkan Teori Identitas berasumsi bahwa *“Konflik disebabkan oleh karena identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak terselesaikan”*. Menurut teori ini bahwa konflik disebabkan oleh ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap kelompok lain, atas perlakuan tidak adil.

B. Tinjauan Umum Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu/ orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan *“society”* artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syarak yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Dengan kata lain pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi menurut (Karl Marx). Menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu

yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu system hidup bersama. (Emile Durkheim).

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan Ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page , mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan

budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.²⁰

2. Masyarakat Konflik di Era Klasik

Masyarakat di era klasik memiliki gambaran masyarakat yang disebut dalam Parsonian, tentang masyarakat dalam kondisi penuh dengan keseimbangan, keselarasan dan tanpa konflik, dan jika mungkin ada konflik tidak dalam kaitan gambaran fungsionalis dari masyarakat.

Masyarakat era klasik lebih memilih dan dominan pada nilai-nilai kerukunan, kebersamaan dan saling bekerjasama. Masyarakat lebih bisa mengontrol konflik daripada harus mengelola konflik. Masyarakat adalah sistem yang saling memiliki ketergantungan sesama yang lain. Masyarakat era klasik sebagian besar menganggap bahwa jika konflik berlanjut dan kemudian terjadi kerusuhan maka hal tersebut sudah menyimpang dari sistem, maka dari itu mereka sangat menolak konflik berkepanjangan dan tidak terselesaikan.

Masyarakat menurut model konsensus, di gambarkan memiliki persyaratan sebagai berikut;²¹

- a. Di dalam masyarakat terdapat nilai dan norma, norma dan nilai merupakan elemen dasar dalam kehidupan sosial,
- b. Konsekuensi sosial adalah komitmen,

²⁰ Donny Prasetyo, Irwansyah. 2020. *Memahami Masyarakat dan Perspektifnys*, Jakarta. Hal. 164

²¹ Wirawan. 2011. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta

- c. Masyarakat pasti kompak,
- d. Kehidupan sosial tergantung pada solidaritas,
- e. Kehidupan sosial di dasarkan pada kerja sama dan saling membutuhkan dan saling memperhatikan,
- f. Sistem sosial tergantung pada consensus,
- g. Masyarakat mengakui adanya otoritas yang abash,
- h. Sistem sosial bersifat integrative, dan
- i. Sistem sosial cenderung bertahan.

Rasio (logika) masyarakat era klasik terdominasi oleh nilai dan norma sistem. Tingkat rasio yang dimiliki masyarakat era klasik lebih dominan daripada cara pandang rasa dan realitas.

Rasio bahwa konflik berlawanan dengan logika dan filosofi mereka. Rasio mereka fokus pada tatanan sistem yang baik, yang sudah di bangun sebelumnya. Bahasa yang dibangun ketaatan pada sistem memiliki peran meningkatnya rasio masyarakat terhadap cara pandang tentang konflik. Masyarakat lebih dominan pada kepatuhan dan ketergantungan sistem, dan cenderung statis.

Selain rasio sangat di pengaruhi oleh nilai dan norma sistem, masyarakat era klasik lebih dominan pada faktor ekonomi. Mereka beranggapan bahwa rasio terbangun oleh kondisi ekonomi yang baik, jika ekonomi baik maka konflik relative bisa di kontrol dan tidak berkembang meluas. Mengutip Marx, tentang analisis bahwa ekonomi memiliki fungsi kenyamanan dan menghindari ide untuk berkonflik.

Dominan ekonomi, nilai dan norma menyimpulkan bahwa masyarakat era klasik cenderung positivistik, determinan, dan taat terhadap sistem. Mekanisme ilmiah berdasarkan prosedur menjadi acuan dalam menentukan tujuan dan akses. Mereka tidak menginginkan hal yang kurang jelas, tidak ilmiah, dan segala sesuatunya harus berdasar pada logika ilmiah dan dapat di pertanggungjawabkan. Prosedur menjadi rujukan utama dalam berbagai langkah, dalam menentukan setiap tujuan. Logika statis, mekanisme terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sangat berlaku kelompok masyarakat ini. Jadi, semakin tinggi tingkat rasio seseorang maka cenderung tidak menanggapi setiap konflik, dan lebih memilih diam dan menganggap bahwa konflik adalah hal yang menyimpang.

3. Masyarakat Modern Terhadap Konflik

Masyarakat modern memiliki pandangan yang beragam dalam menanggapi makna konflik. Hal ini dipengaruhi oleh kemajuan pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat. Nilai-nilai globalisasi menjadi faktor yang menentukan keberagaman pandangan, dan mempengaruhi dalam setiap tindakan, perilaku dan pengambilan keputusan. Realitas konsumerisme, hedonisme, kritikisme, radikalisme menjadi ruang yang tak terpisahkan dalam masyarakat modern, berdampak pada berkurangnya nilai-nilai dan rasio sebagai acuan berpikir.

Degradasi rasio, nilai dan keseimbangan menurun secara signifikan, dan menurut perkiraan akan terus menurun, dan dalam bayangan akan hilang dan berubah mengikuti paradigma tertentu. Realitas sosial menunjukkan

berbagai macam dampak globalisasi yang cenderung ingkar terhadap tujuan yang telah menjadi ikon dari sistem. Sistem tidak mengacu lagi pada keseimbangan, kesejahteraan, dan keserasian akan tetapi menjurus pada realitas yang menghawatirkan. Kehawatiran sosial muncul dalam kondisi dimana masyarakat modern merasakan berbagai macam dampak dari kondisi sistem yang dibangun di era klasik. Kehawatiran berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap rasio, nilai yang selama ini menjadi acuan dalam setiap prosedur yang diamini sebagai ketepatan sosial.

Keterpurukan rasionalitas menciptakan sikap yang reaktif dari masyarakat modern. Berbagai bentuk kritik, dan penolakan dengan keberagaman tindakan baik dengan cara slow maupun frontal imbas dari perubahan yang signifikan terhadap menurunnya kesuksesan (achievement). Harapan yang di impikan oleh rasio dan nilai justru berubah menjadi bumerang karena tidak berjalan sesuai rencana dan mekanisme yang ada. Masyarakat modern lebih dominan pada realitas, dan atau kenyataan yang ada pada saat ini. Anggapan bahwa realitas sekarang merupakan rangkaian kondisi proses berjalannya dari perubahan rasio dan nilai. Meningkatnya penurunan terhadap hasil yang diinginkan menjadi tindakan kontradiktif, dan menjadi pemikiran akan kebohongan dan kepalsuan pada rasio. Realitas lebih menjadi fakta kebenaran daripada rasionalitas.

Rasio dan nilai ekonomi tidak lagi menjadi ketepatan faktor dalam menentukan realitas yang seimbang. Menurut paradigma modern rasio bukan hanya di lihat dari nilai ekonomi, akan tetapi dapat di lihat dari

berbagai jenis dan bentuk dari konteks yang berbeda. Nilai ekonomi mendegradasi dan sekaligus menghegemoni konteks yang lain. Selain konteks ekonomi terdapat konteks sosial budaya, hukum dan sosial politik yang dapat memberikan pandangan lain, yang juga merupakan jenis dan bentuk rasio.

Masyarakat modern melihat konflik bukan hanya berdasarkan dari nilai dan rasionalitas dalam persoalan ekonomi semata, namun juga dilihat dari konteks yang lain. Persepsi masyarakat terhadap konflik lebih beragam karena di lihat dari bermacam-macam sudut pandang, sehingga konflik menjadi kompleks dan menjadi cukup sulit untuk mencari ketepatan sosial. dengan kata lain, bahwa realitas sosial tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan sosial. realitas sosial bukan hanya di lihat dari satu sisi, akan tetapi harus di pandang secara luas dan melebar.

Kebanyakan kasus-kasus konflik di era modern bersumber pada perbedaan persepsi individu dari sudut pandang yang lain, dan kemudian berkembang dan berbenturan. Misal, konflik pembangunan terjadi dikarenakan terdapat konteks sosial yang bertolak belakang dan mengalami crash; ekonomi berbenturan dengan kesejahteraan, kerusakan, dan hukum.

Konsep konflik semakin diperluas, dengan menambah kekuasaan dan kewenangan sebagai sumber konflik.²² Kelompok yang berkonflik bertambah, bukan hanya kelas proletar dan borjuis namun diperlebar dengan hadirnya kelompok-kelompok baru seiring hadiya kemajuan industri. Weber

²² Poloma, M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta, Raja Grafindo Persada

berpendapat bahwa pertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan sosial yang sangat kukuh dan tidak dapat di hilangkan. Weber mengamukakan bahwa sumber konflik di awali oleh tindakan manusia yang selalu di dorong oleh kepentingan-kepentingan.

Keperntingan keperntingan yang dimaksud bukan hanya berdasar pada determinan ekonomi, namun status, dan kekuasaan (politik). Dengan kata lain Weber berpendapat bahwa konflik dalam memperebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial, selain itu menilai bahwa konflik merupakan arena politik di mana kekuasaan dan dominasi oleh sebagian individu atau kelompok terhadap orang lain, yang kedua adalah konflik dalam hal gagasan atau cita cita.

Herbert Marcuse dalam *One Dimension Man* berpendapat bahwa masyarakat modern adalah masyarakat yang represif tapa ampun. Penerimaan dan konformisme atas status quo secara perlahan lahan, yang dipaksakan oleh masyarakat modern adalah suatu totalitariansime. Sangatlah sulit bagi individu untuk mengambil jarak secara kritis terhadap sebuah masalah. Kebebasan berpikir, berbicara dan kehendak hati seperti usaha usaha bebas yang berperan dalam meningkatkan dan melindungi secara essensial merupakan pemikiran kritis yang di desain untuk menggantikan suatu kebudayaan material dan intelektual yang telah using dengan suatu kebudayaan yang lebih produktif.²³

²³ Marcuse H, (ed) 2010. *Manusia Satu Dimensi*. Pustaka Prometha. jakarta

Berdasarkan beberapa pandangan tentang realitas sosial, menginterpretasikan bahwa masyarakat modern memilih realitas sosial sebagai fenomena yang menarik, dan sebagai sumber pemikiran dan kemudian memberikan feed back (timbang balik atau respons) yang kritis terhadap rasio, nilai atau norma. Paradigma masyarakat modern terbangun melalui realitas sosial yang telah mengalami degradasi tujuan dari sebuah konsep prosedural yang mengalami perubahan dikarenakan konteks realitas sosial memiliki bermacam-macam pandangan.

Konflik menurut pandangan masyarakat modern terbentuk dari konteks realitas sosial yang dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Perbedaan pandangan determinan terhadap paradigma, sehingga sangat mungkin dapat di gunakan sebagai modal konflik, yang pada akhirnya akan terjebak dalam situasi yang justru semakin runyam. Realitas sosial di anggap sebagai fenomena yang tidak terbantahkan, sedangkan nomenon menambah daya spirit bagi persepsi individu untuk membela kebenaran realitas (kebenaran alamiah yang absolut, dan tidak terbantahkan).

4. Masyarakat Millenial Terhadap Konflik

Mengutip pernyataan Simmel, menyebut bahwa manusia pada dasarnya suka akan konflik. Pernyataan tersebut memiliki makna tentang individu yang lebih dominan pada rasa, hasrat dan atau keinginan yang sebagian besar berhubungan sangat erat dengan keyakinan, dan kepuasan. Kesukaan manusia untuk berkonflik sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai nomenon yang

dimiliki, dan terkadang konflik terjadi karena tidak memiliki alasan dan tujuan tertentu.

Persepsi individu pada masyarakat yang suka akan konflik lebih dominan pada rasa, keinginan, diselimuti oleh dasar keyakinan dan kepuasan. Tawuran pelajar antar kelompok di dominasi oleh rasa kepuasan ikut terlibat dalam tindakan setia kawan sebagai seorang teman. Konflik antar suku, agama dan keyakinan adalah bentuk konflik yang bersumber dari persepsi individu dengan konsep yang mengedepankan keyakinan dan kepuasan, begitu juga dengan konflik antar keluarga, kekerabatan, dan persaudaraan. Meskipun dalam sebagian besar kasus konflik yang berkaitan dengan rasa, kepuasan memiliki persepsi tidak jelas, dan tidak realistis, akan tetapi bagi masyarakat millennial konflik dianggap sebagai tantangan (challenge), untuk meningkatkan kepercayaan diri, dan identitasnya. Semakin individu berpengalaman dalam berkonflik, akan meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepuasan dirinya.

Meskipun persepsi masyarakat millennial suka dan sangat mungkin menciptakan konflik, namun masyarakat millennial juga memiliki kemampuan untuk menjadi agen konflik. Agen yang sangat tahu kapan menjadi aktor konflik, aktor damai dan aktor penengah. Dengan kata lain, bahwa masyarakat millennial sangat memahami konflik dari berbagai sudut pandang, dan akan berhenti setelah menurut persepsi mereka.

Ketidakpercayaan terhadap hukum, ketakutan akan kepatuhan hukum, dan kekhawatiran terhadap kejahatan saling terkait dan dapat menciptakan

siklus yang merugikan masyarakat. Ketika individu merasa bahwa sistem hukum tidak adil atau tidak efektif dalam menangani kasus-kasus kekerasan, seperti tawuran antar perguruan pencak silat, mereka cenderung kehilangan kepercayaan pada aparat penegak hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum, di mana masyarakat merasa tidak perlu mematuhi norma-norma yang ada karena merasa hukum tidak melindungi mereka. Selain itu, ketakutan akan kejahatan meningkat ketika masyarakat menyaksikan kekerasan yang terjadi di sekitar mereka tanpa adanya tindakan tegas dari pihak berwenang. Ketidakpastian ini dapat mendorong individu untuk mengambil langkah-langkah sendiri dalam melindungi diri, yang sering kali berujung pada tindakan balas dendam atau vigilante, sehingga menciptakan lingkungan yang semakin tidak aman. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui transparansi, keadilan yang nyata, dan upaya pencegahan yang efektif agar siklus negatif ini dapat diputus dan keamanan serta ketertiban dapat terjaga.